

Bhinneka *Poli rika*
**PERKEMBANGAN PEMIKIRAN LUDWIG
WITTGENSTEIN SEBAGAI SARANA REFLEKSI
TERHADAP BHINNEKA TUNGGAL IKA**

*The Development of Ludwig Wittgenstein's Thought as
Reflection Mean to Bhinneka Tunggal Ika*

Rizal Mustansyir¹, Dibyasuharda¹, Sri Soeprapto¹

Program Studi Ilmu Filsafat
Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This thesis described about philosophical problems in Bhinneka Tunggal Ika in monism and pluralism perspectives. Wittgenstein is one of some analytical philosophers, who thought about linguistic problems in philosophy. His thinking divided into two periods. The first period was represented by *Tractatus Logico-Philosophicus*, which assumed that we need uniformity in philosophical language. The second period was represented by *The Philosophical Investigations*, which assumed that our living has pluriformity in the ordinary language. Such ordinary language was expressed and represented by multiplicity of language-games, which have rule of games.

The development of Wittgenstein's thought as reflection mean to Bhinneka Tunggal Ika, where will be find out the main philosophical problems, namely the One and the Many, or unity and plurality, or uniformity and pluriformity. The One and the Many were perennial problems in the history of Western philosophy, since Plato until contemporary philosophies. An inquiry into reality arose two opinions, namely monism and pluralism. Monism assumed that reality is singular, while pluralism assumed that reality is plural. Bhinneka Tunggal Ika as Indonesian symbol means that they are indeed different, but they are of the same kind. Bhinneka Tunggal Ika showed multi-ethnics, multi-linguistics, multi-religions in Indonesia, and all of them been synthesized in unity.

The existence of Bhinneka Tunggal Ika categorically is different from Pancasila. The existence of Bhinneka Tunggal Ika is an "ought to" Indonesia to transcend multiplicity, while Pancasila is the First Principle for Indonesia.

Key-Words: *Bhinneka Tunggal Ika, uniformity, pluriformity, unity, plurality, the One, the Many*

PENGANTAR

Aktivitas bahasa merupakan ciri khas manusia dan melalui bahasa itu pula manusia dapat melaksanakan refleksi dan kebebasannya (Chauchard, 1983; 11). Gadamer bahkan mengatakan bahwa bahasa merupakan *modus operandi* dari cara manusia berada di dunia dan merupakan wujud yang seakan-akan merangkul seluruh konstitusi tentang dunia itu (Sumaryono, 1993; 26). Bahasa apa pun alasannya, harus diakui memainkan peran sangat besar dalam kehidupan manusia.

Manusia itu senantiasa hidup dalam gerak dan perubahan. Gerak dan perubahan menimbulkan keanekaragaman. Keanekaragaman tak pelak lagi akan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Keanekaragaman ini dapat menjadi pemicu konflik manakala tidak dapat dijalin komunikasi yang baik. Oleh karena itu manusia hidup pasti membutuhkan komunikasi, salah satu bentuk komunikasi antar manusia adalah bahasa. Hidup adalah berkomunikasi, sedangkan mati adalah isolasi. Komunikasi sebagai dasar relasi berupaya mengatasi perbedaan, tanpa menegasikan eksistensi individu. Komunikasi yang berhasil senantiasa berlangsung dalam semangat saling menghargai antarindividu, antarkelompok sebagai upaya mendekatkan diri pada kepentingan bersama dan mencegah timbulnya konflik. Komunikasi akan berhasil dalam bahasa yang diakomodasikan secara kontekstual. Wittgenstein adalah salah seorang filsuf analitik di abad kedua puluh, yang perkembangan pemikirannya dapat dibagi ke dalam dua periode. Arah pemikiran Wittgenstein periode pertama adalah menentukan bahasa ideal yang seragam (*uniformity*) bagi filsafat. Arah pemikiran Wittgenstein periode kedua adalah menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya yang beranekaragam (*pluriformity*). Kedua arah pemikiran Wittgenstein ini kiranya mengandung dasar filosofik tentang persoalan *Unity* dan *Plurality*.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur dan suku yang beranekaragam. Semboyan itu merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara 'hal satu' dan 'hal banyak', kesatuan dan kemajemukan. Keanekaragaman di dalam segala aspek kehidupannya tidak dilihat sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia, tetapi justru diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya (Hardono-Hadi, 1993; 61).

Bagaimana penjelasan secara filosofik tentang aspek kesatuan dan kemajemukan dalam Bhinneka Tunggal Ika? Kiranya perkembangan pemikiran Wittgenstein tentang uniformitas dan pluriformitas dapat dipakai sebagai salah satu sarana refleksi atas Bhinneka Tunggal Ika dan itulah yang menjadi masalah penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengangkat dasar konsep uniformitas dan pluriformitas dalam pemikiran Wittgenstein.
2. Evaluasi kritis, yaitu melakukan evaluasi secara kritis terhadap

perkembangan dan pemikiran Wittgenstein dan diperlihatkan kelemahan sekaligus kekuatannya.

3. Menemukan metode baru sebagai salah satu sarana dalam refleksi terhadap Bhinneka Tunggal Ika.

Tinjauan Pustaka

Hal satu (*the One*) dan hal banyak (*the Many*) merupakan problem metafisika yang menyita perhatian banyak filsuf sejak zaman Yunani kuno hingga filsuf kontemporer dewasa ini. Para filsuf yang menekankan kesatuan realitas atau bertitik tolak dari hal satu dalam memahami realitas dinamakan monisme, sedangkan pluralisme adalah pandangan yang menganggap bahwa ada lebih dari dua prinsip azali sebagai suatu hakikat (Edwards, 1967: 363-364). Bakker mengibaratkan pandangan monisme dengan "bubur", sedangkan pluralisme dikiaskan dengan pandangan "pasir". Baik monisme maupun pluralisme dapat bersifat spiritualistik maupun materialistik. Monisme mutlak menyusutkan sedapat mungkin segala kegandaan dan bermacam-ragaman, sehingga hanya tinggal satu realitas tunggal, entah materi atau roh. Sebaliknya pluralisme mutlak menghapus sedapat mungkin segala kesatuan dan keseragaman, sehingga hanya tinggal kejamakan mutlak, yaitu pecahan, entah pecahan materi atau titik-titik rohani. Setiap pengada berdikari, tanpa kesatuan apa pun dengan yang lain. Akan tetapi baik monisme mutlak maupun pluralisme mustahil dipertahankan, sehingga yang ada hanya monisme lunak dan pluralisme lunak atau tendensi monistik dan pluralistik. Monisme lunak menganggap hanya ada satu pengada, entah materi atau roh yang meliputi keseluruhan kenyataan. Segala bentuk monisme menekankan kesatuan dalam keanekaan. Sebaliknya pluralisme lunak menganggap kenyataan itu jamak dan beranekaragam dan terdiri dari unit-unit yang serba otonom dan tanpa hubungan intrinsik. Kalau dirunut lebih jauh, maka pandangan masing-masing filsuf mengenai hal satu dan hal banyak itu memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup tegas (1992: 27, 30).

Pandangan Plato tentang hal satu dan hal banyak bertitik tolak dari upayanya untuk merumuskan kenyataan atau realitas, yakni hal ada (*being*) dan hal menjadi (*becoming*). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan bagi Plato hanya ditemukan dalam dunia ide, yaitu dunia yang bersifat tetap, satu, dan tak terbagi. Di sini terlihat adanya keterkaitan yang erat antara metafisika dengan epistemologi, antara realitas dengan pengetahuan, antara kenyataan dengan kebenaran (Sontag, 1970; 32).

Plotinus mengembangkan ajaran Plato tentang "hal satu" dalam rangka mendukung pandangannya tentang adanya hierarki dalam realitas. Hierarki yang tertinggi, yang menjadi muara dari seluruh kenyataan yang ada dinamakannya *to Hen*, merupakan puncak kesatuan dari segala yang ada (Sontag, 1970; 58). *To Hen* atau *The One* dalam filsafat Plotinus mengacu pada gagasan mengenai Tuhan. *The One* adalah kebaikan yang merupakan tujuan hidup manusia. *The One* adalah Yang Esa, yang segala sesuatu ikut ambil bagian di dalamnya,

sepanjang segala sesuatu itu ada (Delfgaauw, 1992: 46). Problem *the One* dan *the Many* adalah problem metafisika.

Kant mengangkat problem *Unity* dan *Plurality* dalam kerangka epistemologi. Kesatuan sistem pemikiran melalui rasio murni (*pure reason*) bagi Kant merupakan syarat mutlak bagi upaya pemahaman atas realitas. Kant menolak metafisika yang diarahkan pada upaya memahami sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri (*das Ding an sich*). Kant menganggap metafisika itu sebagai suatu bentuk kegiatan akal budi yang semata-mata ditujukan terhadap serta mengenal dirinya sendiri. Kalau metafisika sebelum Kant membicarakan mengenai objek-objek, maka metafisika Kant membicarakan mengenai sistem kaidah berpikir, cara-cara mengetahui yang dipunyai akal budi manusia (Froe, 1984: 34). Kant menegaskan bahwa yang penting adalah menyusun kategori-kategori pemikiran yang dapat menjelaskan dunia fenomena. Penyusunan itu diungkapkan dalam bentuk putusan yang berlaku umum, bersifat mutlak, dan mengandung kebaruan. Hal itu disebut putusan *sintetik a priori*. Filsafat Kant dinamakan *Filsafat Transendental*, artinya ide suatu ilmu pengetahuan yang kritik akal murninya (*Critique of Pure Reason*) harus membuat seluruh rencana secara arsitektonis, yaitu dari prinsip-prinsip dengan jaminan penuh bagi validitas dan stabilitas semua bagian yang membentuk bangunan itu. Itulah yang dimaksud dengan sistem semua prinsip akal murni (Kant, 1991: 39).

Sistem pemikiran versi Kant ini dikembangkan oleh Hegel untuk mendukung pemikiran tentang Roh Absolut. Semua gerak yang ada dalam kenyataan ini pada akhirnya menuju pada kesatuan pada Roh yang Absolut. Roh Tuhan menurut Hegel adalah ide absolut yang menciptakan semua realitas melalui pengasingan (*alienating*) substansinya dalam dunia alamiah dan dunia manusia. Setelah pengasingan substansi itu dalam dunia realitas, ide absolut secara progresif mengasumsikan kembali substansinya ke dalam dirinya sendiri dan kemudian tiba pada kesadaran diri sepenuhnya atau roh mutlak. Oleh karena itu seluruh realitas adalah rasional dalam beberapa cara, sebab ide diaktualisasikan di dalamnya (Sullivan, 1970: 40).

Cassirer memperluas pandangan Kant dengan menekankan pada usaha mencari kesatuan dasar dunia ideal. Mitos, bahasa, religi, sains, dan seni merupakan tahap dalam proses maju ke arah pembebasan diri manusia. Sehingga kebudayaan merupakan wahana pengembangan diri manusia. Sintesis filosofis ditawarkan untuk mengatasi hal-hal yang tampaknya bertentangan. Tetapi sintesis filosofis punya arti berbeda. Di situ kita tidak mencari kesatuan tindakan; bukan keseragaman produk, melainkan keseragaman proses kreatif (Cassirer, 1987: 108).

Wittgenstein termasuk salah seorang filsuf analitik yang *concern* dengan persoalan bahasa dalam bidang filsafat.

Perkembangan pemikiran Wittgenstein sebagai tokoh filsafat bahasa dapat dibagi ke dalam dua tahapan yang berlainan prinsip satu sama lain. Wittgenstein I berupaya menentukan suatu bahasa ideal bagi filsafat yaitu, suatu bahasa yang didasarkan pada logika bahasa yang sempurna, bermakna univok, dan terbatas (Wittgenstein, 1969:

7). Wittgenstein dalam periode ini mendambakan bahasa yang seragam (*uniformity*) dalam bidang filsafat, agar para filsuf terhindar dari kerancuan bahasa. Wittgenstein I mencoba menangkap dasar kesatuan melalui bahasa ideal, sehingga dasar pemikiran lebih bersifat konseptual. Dalil bahwa ada paralelitas antara bahasa dengan realitas, artinya bahasa dipandang sebagai gambar atau cermin realitas (Pitcher, 1964: 78).

Perubahan radikal terjadi dalam pemikiran Wittgenstein pada permulaan tahap kedua, ketika Wittgenstein melihat pluriformitas justru lebih menonjol dalam kehidupan kongkret. Usaha univokalitas dalam pemikiran Wittgenstein I ditinggalkan, sebab Wittgenstein II lebih menekankan pada penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari mengandung begitu banyak keberagaman yang membentuk permainan bahasa (*language-games*) (Lyotard, 1989: 10 ; Charlesworth, 1959; 104). Pluriformitas merupakan kenyataan kongkret yang tak terbantahkan. Ada begitu banyak permainan bahasa yang berlangsung sesuai dengan aturan mainnya masing-masing. Peranan penting sebuah aturan permainan dicontohkan dalam permainan catur (Wittgenstein, 1983: 12, 150). Wittgenstein II mencoba menangkap realitas sebagaimana adanya, sehingga dasar pemikirannya lebih bersifat realistik.

Apabila kedua tahap pemikiran filsafati Wittgenstein ini dikaitkan dengan problem *the One* dan *the Many*, maka terlihat kecenderungan bahwa pandangan Wittgenstein secara keseluruhan memihak pada *the Many* atau pluralisme lunak, meskipun faktor *the One* dalam Wittgenstein I cukup mendapat perhatian yang besar dalam konteks bahasa ideal. Wittgenstein II yang mengetengahkan konsep *language-games* cenderung memihak pada pluralisme lunak, karena keberagaman dan perbedaan dipandang sebagai esensi. Unsur kesatuan (*unity*) hanya diberi perhatian kecil dalam konsep *family resemblances*, kemiripan keluarga (Wittgenstein, 1983: 32).

Problem metafisika dalam pemikiran filsuf-filsuf klasik tentang hal satu (*the One*) dan hal banyak (*the Many*) yang diarahkan pada realitas ini dimodifikasi oleh Wittgenstein untuk diterapkan dalam problem kebahasaan. Realitas dalam pandangan para filsuf analitik identik dengan persoalan bahasa. Bahasa dalam filsafat kontemporer, memainkan peranan yang dapat dibandingkan dengan *being* dalam filsafat klasik. Bertens menyatakan bahwa memang terdapat kemiripan tertentu antara bahasa dengan *being*, yakni sama-sama bersifat universal. *Being* adalah universal dari sudut objektif, sedangkan bahasa universal dari sudut subjektif, karena bahasa meliputi segala sesuatu yang dikatakan atau diungkapkan; makna atau arti hanya bisa timbul dalam hubungan dengan bahasa (1987; 123).

Persoalan mengenai kesatuan dan kemajemukan, yang terlihat dalam perkembangan filsafat Barat ini, terutama gerak perkembangan pemikiran Wittgenstein tentang uniformitas dan pluriformitas, kiranya termuat pula dalam Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini pula yang akan ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian ini.

CARA PENELITIAN

1. Bahan atau materi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, terutama karya-karya kefilosofatan yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran Wittgenstein dan literatur yang membahas lambang negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Materi penelitian ini mencakup karya-karya asli Wittgenstein, ulasan para komentator, literatur yang membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika.

2. Jalan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data: mengumpulkan data-data tentang gerak perkembangan pemikiran Wittgenstein baik dari kepustakaan primer mau pun kepustakaan pendukung lainnya.
- b. Klasifikasi data: data yang telah dikumpul kemudian diklasifikasikan, sehingga dapat diikuti secara cermat arah perkembangan pemikiran Wittgenstein.
- c. Analisis data: data yang telah diklasifikasikan itu dianalisis menurut metode yang dipilih.
- d. Interpretasi data: data yang telah dianalisis itu kemudian diinterpretasi.

3. Analisis hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hermeneutik-refleksif sebagai berikut.

- a. Hermeneutik :
 - 1). Analisis terhadap pemikiran Wittgenstein periode pertama dan kedua.
 - 2). Mengangkat dasar diskontinuitas dan kontinuitas dalam perkembangan pemikiran Wittgenstein tentang fungsi bahasa.
 - 3). Refleksi terhadap Bhinneka Tunggal Ika, seperti hal itu terwujud dalam keberagaman hidup bangsa Indonesia.
 - 4). Mengangkat tata hubungan antara kesatuan dan keberagaman yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Refleksi atas relevansi perkembangan pemikiran Wittgenstein terhadap Bhinneka Tunggal Ika.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut.

Pertama, problem filosofik mengenai "hal Satu" (*the One*) dan "hal Banyak" (*the Many*), kesatuan (*unity*) dan kemajemukan (*plurality*), keseragaman (*uniformity*) dan keanekaragaman (*pluriformity*) terletak dalam ruang lingkup yang saling berhimpitan atau saling tumpang tindih, namun sesungguhnya dapat dibedakan. Problem "hal Satu" dan "hal Banyak" merupakan problem ontologik, yang mencoba menentukan asal realitas. Problem kesatuan dan kemajemukan terletak dalam kawasan epistemologik, yang berupaya menentukan sistem

berpikir. Problem keseragaman dan keanekaragaman terletak dalam bidang bahasa (kebudayaan), yang mempersoalkan sarana yang lebih memadai bagi manusia dalam memahami dan mengungkapkan kenyataan. Perkembangan pemikiran Wittgenstein dapat dikatakan mencakup ketiga bidang di atas, namun kecenderungannya lebih dititikberatkan pada butir ketiga, yakni kebahasaan.

Kedua, perkembangan pemikiran Wittgenstein dari periode pertama pada periode kedua menunjukkan adanya diskontinuitas. Diskontinuitas yang menunjukkan perubahan pola pikir, yang semula menekankan pada bidang yang bersifat logis — didasarkan atas logika bahasa yang sempurna sebagai ciri pemikiran Wittgenstein I — kepada bidang yang bersifat empirik, karena bertitik tolak dari bahasa sehari-hari yang memperlihatkan keanekaragaman bentuk permainan bahasa (ciri pemikiran Wittgenstein II). Diskontinuitas dalam arti penolakan Wittgenstein II atas pemikirannya terdahulu (Wittgenstein I) sesungguhnya menunjukkan adanya perkembangan tujuan dan arah pemikiran dari Wittgenstein I ke Wittgenstein II. Tujuan pemikiran Wittgenstein I adalah mengatasi kekacauan penggunaan bahasa dalam bidang filsafat. Arah pemikiran Wittgenstein I yaitu membentuk bahasa ideal, yakni bahasa yang didasari atas logika. Tujuan pemikiran Wittgenstein II adalah menangkap realitas sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Arah pemikiran Wittgenstein II yaitu menggambarkan realitas dengan menemukan, menepatkan, dan membedakan aturan permainan dalam berbagai permainan bahasa (*Language-games*). Arah pemikiran Wittgenstein pada kedua periode dapat dipakai sebagai alat analisis bagi Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan problem yang dihadapi, yakni kesatuan dan keanekaragaman.

Ketiga, pemikiran Wittgenstein I yang terarah pada upaya mencari kesatuan bahasa ideal bagi filsafat. Namun, kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah kesatuan tanpa paksaan, kesatuan yang tumbuh dari kesadaran akan makna pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika berarti kesatuan dalam keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Pemikiran Wittgenstein II sebagai perkembangan pemikirannya menunjukkan perhatian yang besar terhadap realitas sesungguhnya, yakni keanekaragaman. Unsur keanekaragaman (pluriformitas) yang tercermin dalam teorema permainan bahasa merupakan salah satu cara analisis bagi konsep "berbeda-beda" dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda merupakan ciri pluriformitas, sekaligus menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Keanekaragaman adalah fakta kehidupan manusia yang merupakan kodrat-alami, mustahil untuk diingkari.

Keempat, harmoni antara kesatuan dan keanekaragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika bersifat statis sekaligus dinamis. Aspek statis menekankan pada kesatuan atau kesamaan kesadaran, cita-cita, semangat, dan tujuan. Kesatuan didasarkan pada kesamaan historis yakni penderitaan yang sama-sama dialami dalam era penjajahan dan diwujudkan dalam keputusan. Aspek dinamis melihat perbedaan yang ada di antara berbagai suku bangsa itu sebagai kenyataan konkret, yang

bersifat alamiah atau merupakan fakta kehidupan yang tak terbantahkan.

Kelima, Unsur kesatuan bersifat subjektif, karena merupakan upaya pemikiran manusia untuk menemukan kesamaan dalam perbedaan atau keseragaman dalam keanekaragaman. Arah pemikiran Wittgenstein I cenderung pada kesatuan atau uniformitas. Namun dalam perkembangan pemikirannya, Wittgenstein II cenderung berpijak pada kenyataan konkret dan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti berbeda-beda dalam satu itu mengandung aspek keanekaragaman dan kesatuan sekaligus. Aspek kesatuan bersifat subjektif-fungsional, karena selalu atas dasar penunjukan pada kenyataan suatu ide yang dihayati karena kesepakatannya. Aspek keanekaragaman selalu bersifat objektif, karena penunjukan pada kenyataan yang berupa: multi-etnik, multi-budaya dan multi-religi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan lebih lanjut dalam kehidupan bangsa Indonesia, seharusnya mengarah pada peningkatan kesadaran dan penghayatan kesatuan dalam kekayaan keanekaragaman, sebab pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ditegakkan atas dasar Pancasila mampu merangkul keanekaragaman atau perbedaan itu sebagai suatu kekayaan bangsa. Hal ini perlu dipertegas agar dapat menjadi bahan renungan lebih jauh dalam pemahaman atas makna lambang negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung *raison d'être* (alasan keberadaannya) harus tetap dipahami dalam pengalaman historis bangsa Indonesia, karena kata "ika" dalam rangkaian istilah Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan isyarat penunjukkan (deiktik) pada bangsa Indonesia. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam dimensi kefilsafatan memang saling berhimpitan, namun secara kategoris dapat dibedakan. Pancasila dapat dipandang sebagai Prinsip Pertama (*First Principle*) bagi keberadaan bangsa Indonesia, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu keharusan (*das Sollen*) bagi keutuhan bangsa Indonesia.

Keenam, Bhinneka Tunggal Ika sebagai cerminan budaya bangsa Indonesia itu bersifat dinamik karena kesatuan sebagai titik ideal terus-menerus diperjuangkan. Manusia Indonesia yang mono-pluralis — menurut istilah Notonagoro — sebagai pendukung Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka mencapai harmoni yang bertujuan menggalang semangat persatuan dan kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A., 1992, *Ontologi: Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Cassirer, E., 1987, *An Essay on Man*, Diindonesiakan oleh: A.A.Nugroho (Manusia Dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia), Gramedia, Jakarta.
- Charlesworth, M.J., 1959, *Philosophy And Linguistic Analysis*, Duquesne University, Pittsburgh.

- Chauchard, P., 1983, *Le langage et la Pensée*, diterjemahkan oleh: Widyamartaya, "Bahasa Dan Pikiran", Kanisius, Yogyakarta.
- Delfgaauw, B., 1988, *Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte*, Alih Bahasa: Soejono Soemargono (Sejarah Ringkas Filsafat Barat), Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Edwards, P., 1967, *The Encyclopedia of Philosophy*, The Macmillan Company & The Free Press, New York.
- Froe, A.de., 1984, *Apakah Filsafat itu?*, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, Nur Cahaya, Yogyakarta.
- Hardono-Hadi, 1994, *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kant, I., 1991, *Critique of Pure Reason*, Translated by: J.M.D.Meiklejohn, J.M.Dent & Sons Ltd, London.
- Lyotard, J. F., 1989, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Fourth Edition, Manchester University Press, Manchester.
- Pitcher, G., 1964, *The Philosophy of Wittgenstein*, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Sontag, F., 1970, *Problems of Metaphysics*, Chandler Publishing Company, Pennsylvania.
- Sullivan, J. E., 1970, *Prophets Of The West; An Introduction to the Philosophy of History*, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York.
- Sumaryono, E., 1993, *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wittgenstein, L., 1969, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Fourth Impression, with a new Translation by: D.F.Pears & B.F. Mc Guinness, Routledge & Kegan Paul Ltd, London.
- Wittgenstein, L., 1983, *Philosophical Investigations*, translated by: G.E.M. Anscombe, Tenth Edition, Basil Blackwell, Oxford.